



## Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



### Benarkah Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Menurunkan Kualitas Pembangunan?

Andita Ratih<sup>1✉</sup>, Intan Khaeruli Fathilda<sup>2✉</sup>, Gisela Adio Ros Maria<sup>3✉</sup>, Nazil Afifatun Nikmah<sup>4✉</sup>, Tristiano<sup>5</sup>, Agus Sugianto<sup>6</sup>, Novita Setiyanti<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus

✉ [andita.ratih@gmail.com](mailto:andita.ratih@gmail.com)<sup>1</sup>, [lulifathilda25@gmail.com](mailto:lulifathilda25@gmail.com)<sup>2</sup>, [giselaadio@gmail.com](mailto:giselaadio@gmail.com)<sup>3</sup>, [nazil.indonesia17@gmail.com](mailto:nazil.indonesia17@gmail.com)<sup>4</sup>

#### Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata kunci:

Efisiensi Anggaran;  
Kualitas Pembangunan  
Daerah; Tata Kelola  
Fiskal; Transfer  
Keuangan Daerah.

#### Abstrak

Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) berpotensi menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan bagi pemerintah daerah, khususnya daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis dampak penurunan TKD terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Kudus serta menelaah secara kritis apakah penurunan anggaran tersebut berimplikasi pada penurunan kualitas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif berbasis simulasi kebijakan dengan memanfaatkan kerangka Keynesian fiskal multiplier, Hukum Okun, dan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dokumen APBD dan RKPD, serta publikasi kebijakan fiskal nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan TKD sebesar Rp538,03 miliar atau sekitar 33,2 persen dibandingkan tahun 2025 berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 0,9-1,1 persen, meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sekitar 0,4 poin persentase, serta menaikkan tingkat kemiskinan sekitar 0,3 poin persentase. Meskipun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa penurunan TKD tidak dapat dijadikan justifikasi normatif maupun akademik untuk menurunkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Artikel ini menegaskan bahwa kualitas alokasi belanja, efisiensi pengelolaan anggaran, inovasi kebijakan, kolaborasi lintas aktor, serta modal sosial masyarakat merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal.

#### Abstract

Keywords:

Fiscal Governance;  
Intergovernmental  
Fiscal Transfers; Public  
Spending Efficiency;  
Regional Development  
Quality; Subnational  
Government.

*A reduction in intergovernmental fiscal transfers poses significant fiscal pressure on local governments, particularly in regions with high fiscal dependency. This article examines the economic impacts of a decline in regional fiscal transfers in Kudus Regency and critically assesses whether such fiscal contraction necessarily leads to a deterioration in the quality of regional development. The study employs a quantitative descriptive approach using policy simulation based on the Keynesian fiscal multiplier framework, Okun's Law, and poverty-growth elasticity. Secondary data are drawn from official statistics, regional budget and planning documents, and*

---

*national fiscal policy publications. The findings indicate that a reduction in fiscal transfers of IDR 538.03 billion, equivalent to a 33.2 percent decrease from 2025 levels, may reduce regional economic growth by approximately 0.9–1.1 percent, increase the open unemployment rate by about 0.4 percentage points, and raise the poverty rate by around 0.3 percentage points. However, the analysis demonstrates that fiscal contraction does not inherently justify a decline in the quality of development outcomes. The study highlights that the effectiveness of public spending allocation, budgetary efficiency, policy innovation, cross-sector collaboration, and social capital play a decisive role in sustaining development quality under fiscal constraints. These findings position fiscal pressure as a potential catalyst for governance transformation rather than merely a constraint on regional development.*

---

ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

## **PENDAHULUAN**

Transfer Keuangan Daerah (TKD) merupakan instrumen utama dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia yang berfungsi memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan stabilisasi ekonomi lokal. Bagi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang belum optimal, TKD menjadi komponen dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori daerah yang masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap dana transfer pusat dan kapasitas fiskal yang sedang, terutama untuk membiayai belanja pegawai, belanja modal, pelayanan publik, dan perlindungan sosial.

Dalam konteks kebijakan fiskal nasional tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kudus menghadapi potensi penurunan Transfer Keuangan Daerah yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp538,03 miliar atau sekitar 33,2 persen dibandingkan tahun 2025. Skala penurunan ini tidak lagi bersifat penyesuaian marginal, melainkan mencerminkan tekanan fiskal yang serius (*severe fiscal shock*) bagi keuangan daerah. Penurunan TKD dalam besaran tersebut berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah secara drastis, mengganggu kesinambungan program pembangunan, serta menimbulkan risiko perlambatan ekonomi dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik kebijakan, kondisi penurunan anggaran sering kali dipersepsikan sebagai justifikasi normatif atas penurunan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Logika ini menyiratkan bahwa kualitas layanan publik berbanding lurus secara langsung dengan besaran anggaran yang tersedia. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan literatur ekonomi publik dan tata kelola pemerintahan. Teori desentralisasi fiskal menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya transfer fiskal, melainkan oleh kualitas alokasi belanja, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal (Musgrave, 1959; Oates, 1972). Dalam kondisi tekanan fiskal, pemerintah daerah justru dituntut untuk memperkuat prinsip *value for money*, yaitu memastikan bahwa setiap rupiah belanja publik menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang optimal. Penelitian Musgrave (1959) menekankan bahwa fungsi alokasi dan stabilisasi fiskal harus tetap dijaga, bahkan ketika sumber daya keuangan mengalami kontraksi. Dengan kata lain, keterbatasan anggaran tidak serta-merta menurunkan kualitas output pembangunan, melainkan menginisiasi adanya perbaikan prioritas, efisiensi belanja, dan inovasi kebijakan.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa daerah dengan tata kelola yang baik mampu menjaga kualitas pelayanan publik meskipun menghadapi keterbatasan fiskal. Studi Wibowo dan Sasana (2021) pada kabupaten/kota di Jawa Tengah menemukan bahwa efisiensi belanja dan kapasitas institusional memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja ekonomi daerah dibandingkan besaran dana transfer. Laporan OECD (2019) juga menegaskan bahwa inovasi sektor publik, digitalisasi layanan, dan penyederhanaan proses birokrasi sering kali bersifat berbiaya rendah namun

berdampak tinggi, sehingga dapat menjadi strategi efektif dalam merespons tekanan fiskal. Selain aspek tata kelola dan inovasi, literatur pembangunan modern menempatkan modal sosial dan dimensi psikologis sebagai faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Putnam (2000) menunjukkan bahwa kepercayaan, jejaring sosial, dan partisipasi masyarakat berperan besar dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Sen (1999) memandang pembangunan bukan sekadar akumulasi sumber daya fiskal, tetapi sebagai proses perluasan kapasitas, agensi, dan partisipasi manusia. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Kudus, kelekatan psikologis masyarakat terhadap wilayahnya, budaya gotong royong, serta kekuatan komunitas lokal dapat menjadi modal non-fiskal yang strategis dalam menjaga kualitas pembangunan ketika anggaran mengalami tekanan berat. Meskipun kajian mengenai dampak penurunan TKD terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih menempatkan anggaran sebagai variabel penentu utama kinerja daerah dan belum secara memadai mengintegrasikan dimensi kualitas tata kelola, kualitas kebijakan, kolaborasi lintas aktor, serta modal sosial. Kajian yang mengangkat penurunan TKD sebagai momentum transformasi tata kelola, bukan sekadar ancaman fiskal, masih relatif terbatas, khususnya pada level kabupaten.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penurunan Transfer Keuangan Daerah yang signifikan terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Kudus, sekaligus menegaskan bahwa penurunan TKD bahkan dalam skala besar tidak dapat dijadikan alasan normatif maupun akademik untuk menurunkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Artikel ini berupaya memberikan kontribusi konseptual dan empiris dengan menempatkan anggaran sebagai bentuk komitmen fiskal yang harus diperkuat oleh faktor-faktor esensial lain, seperti efisiensi, inovasi, kolaborasi, dan kelekatan psikologis masyarakat, guna menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif yang berorientasi kebijakan untuk menganalisis dampak penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Kudus. Ruang lingkup kajian dibatasi pada periode historis 2020-2025 sebagai basis data dan proyeksi kebijakan tahun 2026 dengan skenario utama penurunan TKD sebesar Rp538,03 miliar atau sekitar 33,2 persen dibandingkan tahun 2025, yang diperlakukan sebagai *fiscal shock* terhadap komponen belanja pemerintah daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder runtut waktu yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, dokumen APBD, KUA-PPAS, dan RKPD yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, serta publikasi kebijakan fiskal nasional dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bappenas. Analisis dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan menggunakan pendekatan *Keynesian Fiscal Multiplier* dengan asumsi nilai pengganda fiskal pada kisaran 1,8–2,6 untuk mengestimasi perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akibat penurunan belanja pemerintah. Dampak terhadap pengangguran dianalisis menggunakan Hukum Okun dengan koefisien sebesar 0,4, sedangkan dampak terhadap kemiskinan diestimasi melalui elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan sebesar -0,3, mengacu pada temuan empiris nasional. Selain itu, dampak tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianalisis menggunakan elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7. Seluruh hasil kuantitatif kemudian diinterpretasikan secara analitis dengan merujuk pada teori keuangan publik dan pembangunan daerah untuk menegaskan bahwa tekanan fiskal akibat penurunan TKD tidak hanya berdampak pada indikator ekonomi, tetapi juga menuntut peningkatan efisiensi belanja, inovasi kebijakan, dan kualitas tata kelola dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp538,03 miliar pada tahun 2026 berpotensi menimbulkan kontraksi ekonomi yang signifikan di Kabupaten Kudus. Dengan menggunakan pendekatan *Keynesian Fiscal Multiplier* dan asumsi nilai pengganda fiskal pada kisaran 1,8-2,6, penurunan belanja pemerintah daerah diperkirakan menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara Rp968 miliar hingga Rp1,40 triliun. Secara persentase, kontraksi ini setara dengan penurunan PDRB sekitar 0,9–1,1 persen dari total

PDRB Kabupaten Kudus. Besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal, khususnya melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa. Efek pengganda fiskal menyebabkan pengurangan belanja publik tidak hanya berdampak langsung pada output pemerintah, tetapi juga menurunkan pendapatan pelaku usaha, daya beli rumah tangga, dan permintaan agregat secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan literatur ekonomi regional yang menegaskan bahwa daerah dengan struktur ekonomi yang relatif sempit dan ketergantungan fiskal tinggi cenderung lebih rentan terhadap *fiscal shock*. Namun demikian, besarnya dampak ekonomi tersebut tidak serta-merta mencerminkan penurunan kualitas pembangunan daerah. Literatur keuangan publik menegaskan bahwa respons kebijakan pemerintah daerah terhadap tekanan fiskal menjadi faktor penentu utama apakah kontraksi ekonomi bersifat sementara atau berkembang menjadi perlambatan struktural. Dengan kata lain, hasil ini mengindikasikan adanya risiko ekonomi yang nyata, tetapi juga membuka ruang bagi strategi adaptif berbasis efisiensi dan inovasi kebijakan.

## **2. Pengangguran dan Dinamika Pasar Kerja**

Penurunan PDRB akibat kontraksi belanja pemerintah berimplikasi langsung terhadap kondisi pasar kerja di Kabupaten Kudus. Berdasarkan Hukum Okun dengan koefisien 0,4, penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen diperkirakan meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar  $\pm 0,4$  poin persentase. Dengan asumsi tingkat pengangguran awal sekitar 3,2 persen, TPT pada tahun 2026 berpotensi meningkat menjadi kisaran 3,6-3,7 persen. Kenaikan pengangguran ini terutama berpotensi terjadi pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada belanja pemerintah dan konsumsi lokal, seperti konstruksi, perdagangan kecil, jasa informal, dan industri pendukung proyek publik. Selain pengangguran terbuka, dampak lain yang berpotensi muncul adalah peningkatan *underemployment*, yaitu berkurangnya jam kerja dan pendapatan pekerja tanpa kehilangan pekerjaan secara formal. Fenomena ini sering kali tidak langsung tercermin dalam statistik pengangguran, tetapi memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari perspektif kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa penurunan TKD dalam skala besar dapat meningkatkan kerentanan tenaga kerja, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan pekerja informal. Namun, berbagai studi kebijakan menegaskan bahwa program padat karya produktif, restrukturisasi belanja, dan dukungan terhadap UMKM lokal dapat menahan dampak negatif terhadap ketenagakerjaan tanpa memerlukan tambahan anggaran yang besar. Dengan demikian, kualitas respons kebijakan kembali menjadi faktor penentu utama.

## **3. Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Dampak lanjutan dari perlambatan ekonomi akibat penurunan TKD juga tercermin pada potensi peningkatan tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan sebesar  $-0,3$ , penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen diperkirakan meningkatkan tingkat kemiskinan sekitar 0,3 poin persentase. Secara konkret, tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus berpotensi meningkat dari sekitar 6,59 persen menjadi mendekati 6,89 persen pada tahun 2026. Peningkatan kemiskinan ini terutama dipicu oleh melemahnya pendapatan rumah tangga yang bergantung pada sektor informal dan usaha mikro, serta berkurangnya peluang kerja sementara dari proyek-proyek pemerintah. Selain itu, tekanan fiskal berisiko mendorong pemangkasan belanja sosial dan program perlindungan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan *refocusing* yang tepat. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai masalah pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Meskipun demikian, literatur pembangunan menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan juga oleh ketepatan sasaran dan desain program. Program perlindungan sosial yang terfokus, penggunaan data terpadu, serta kolaborasi dengan komunitas lokal dapat menjaga efektivitas intervensi meskipun sumber daya fiskal menurun. Oleh karena itu, hasil ini memperkuat argumen bahwa penurunan TKD meningkatkan risiko sosial, tetapi tidak secara deterministik menurunkan kualitas perlindungan masyarakat apabila tata kelola kebijakan dijalankan secara adaptif.

#### 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penurunan aktivitas ekonomi akibat kontraksi belanja pemerintah juga berdampak tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan asumsi elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7, penurunan pertumbuhan sekitar 1 persen diperkirakan menurunkan PAD sekitar 0,7 persen. Dengan basis PAD sekitar Rp690 miliar, potensi kehilangan PAD diperkirakan mencapai Rp4-5 miliar pada tahun 2026. Dampak ini menciptakan kondisi *double fiscal squeeze*, di mana pemerintah daerah menghadapi penurunan TKD sekaligus melemahnya sumber pendapatan internal. Kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan tekanan terhadap keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Namun, besarnya penurunan PAD relatif lebih kecil dibandingkan penurunan TKD, sehingga secara kebijakan masih terdapat ruang untuk melakukan optimalisasi PAD melalui intensifikasi, digitalisasi pemungutan, dan pengelolaan aset daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan fiskal tidak hanya bersumber dari sisi belanja, tetapi juga dari sisi pendapatan. Oleh karena itu, strategi penguatan PAD yang berorientasi pada efisiensi dan kepatuhan menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah penurunan transfer pusat.

#### SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp538,03 miliar atau sekitar 33,2 persen dibandingkan tahun 2025 memberikan dampak makroekonomi yang nyata bagi Kabupaten Kudus. Simulasi fiskal memperlihatkan potensi kontraksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah pada kisaran 0,9–1,1 persen, yang diikuti oleh peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka sekitar 0,4 poin persentase, kenaikan tingkat kemiskinan sekitar 0,3 poin persentase, serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat melemahnya aktivitas ekonomi. Temuan ini menegaskan peran strategis TKD sebagai instrumen stabilisasi fiskal dan pendorong utama dinamika ekonomi daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya dampak ekonomi tersebut tidak dapat ditafsirkan secara simplistik sebagai hubungan linier antara penurunan anggaran dan penurunan kualitas pembangunan. Literatur keuangan publik dan pembangunan daerah secara konsisten menegaskan bahwa kualitas alokasi belanja, efisiensi pengelolaan anggaran, dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah memiliki peran yang sama pentingnya, bahkan sering kali lebih menentukan, dibandingkan besaran anggaran itu sendiri. Dengan kata lain, anggaran merupakan bentuk komitmen fiskal, tetapi bukan satu-satunya penentu kualitas *outcome* pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Kudus, tekanan fiskal akibat penurunan TKD justru menguji kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan transformasi tata kelola. Risiko penurunan kualitas pembangunan dan pelayanan publik bukanlah konsekuensi yang bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada respons kebijakan yang diambil. Apabila penurunan TKD direspons dengan pemangkasan belanja secara linier tanpa prioritas dan inovasi, maka dampak sosial-ekonomi akan cenderung memburuk, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah pinggiran. Sebaliknya, apabila tekanan fiskal direspons melalui *refocusing* belanja, penguatan efisiensi, dan perlindungan terhadap belanja berdampak tinggi, maka kualitas pembangunan masih dapat dijaga meskipun ruang fiskal menyempit. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya faktor-faktor non-fiskal dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Kreativitas kebijakan, inovasi sektor publik, dan kolaborasi lintas aktor menjadi instrumen kunci dalam mengompensasi keterbatasan anggaran. Program padat karya produktif, digitalisasi layanan publik, kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas lokal, serta pemanfaatan aset dan jejaring daerah merupakan contoh strategi berbiaya relatif rendah namun berdampak tinggi. Selain itu, modal sosial dan kelekatan psikologis masyarakat terhadap daerah dalam bentuk kepercayaan, partisipasi, dan rasa memiliki menjadi sumber daya strategis yang sering kali tidak tercermin dalam neraca fiskal, tetapi sangat menentukan efektivitas kebijakan publik.

Oleh karena itu, simpulan utama penelitian ini adalah bahwa penurunan TKD dalam skala besar memang meningkatkan tekanan fiskal dan risiko sosial-ekonomi, tetapi tidak dapat dijadikan alasan normatif maupun akademik untuk menurunkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kudus. Justru dalam kondisi keterbatasan anggaran, tuntutan terhadap kualitas tata kelola, ketepatan prioritas, dan inovasi kebijakan menjadi semakin tinggi. Penurunan TKD sepatutnya

diposisikan sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal dan kelembagaan daerah, bukan sebagai pembenaran atas stagnasi pembangunan. Secara konseptual dan praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dimiliki, tetapi oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola, dilengkapi, dan diperkuat oleh faktor-faktor esensial lain di luar fiskal. Dalam kerangka tersebut, Kabupaten Kudus memiliki peluang untuk menjadikan tekanan fiskal sebagai katalis transformasi menuju pembangunan daerah yang lebih efisien, kolaboratif, dan berkelanjutan.

## SARAN

Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menetapkan perlindungan anggaran (*ring-fencing*) terhadap belanja yang memiliki dampak langsung dan tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya belanja pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), perlindungan sosial, program padat karya produktif, serta belanja modal skala kecil–menengah yang menopang aktivitas ekonomi lokal. Dalam teori keuangan publik, *The Theory of Public Finance* menegaskan bahwa fungsi alokasi dan distribusi pemerintah harus tetap dijaga bahkan dalam kondisi tekanan fiskal. Secara filosofis, pembangunan publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Pemotongan anggaran yang bersifat linier tanpa prioritas justru berisiko memperdalam kemiskinan dan ketimpangan, serta melemahkan daya ungkit belanja pemerintah terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, langkah ini bertujuan agar penurunan TKD tidak langsung diterjemahkan menjadi penurunan kualitas layanan publik dan perlindungan sosial, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat. Implementasinya dapat dilakukan dengan menetapkan batas minimum alokasi belanja pelayanan dasar dan belanja produktif dalam APBD, melakukan *refocusing* dari belanja administratif ber-multiplier rendah, serta mengintegrasikan program padat karya dan infrastruktur ekonomi lokal ke dalam belanja rutin pembangunan wilayah, terutama di kecamatan dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi.

Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki justifikasi manfaat yang jelas (*value for money*) serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Konsep *value for money* dalam ekonomi sektor publik menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari output dan outcome yang dihasilkan. Teori *Fiscal Federalism* menegaskan bahwa pemerintah daerah yang dekat dengan masyarakat memiliki keunggulan komparatif dalam menentukan prioritas belanja yang paling relevan, bahkan ketika sumber daya fiskal terbatas. Perubahan orientasi ini bertujuan memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menurunkan kualitas pembangunan, tetapi justru mendorong efisiensi, ketepatan sasaran, dan fokus pada belanja berdaya ungkit tinggi. Evaluasi belanja dapat dilakukan melalui penilaian ulang program yang berulang dan fragmentatif, belanja birokrasi rutin, serta kegiatan dengan dampak ekonomi rendah, kemudian mengalihkan sumber daya tersebut ke program lintas sektor yang mendukung produktivitas ekonomi, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Sejalan dengan temuan *Economic Outlook 2026*, Pemerintah Kabupaten Kudus juga perlu menggeser paradigma pengelolaan APBD dari sekadar instrumen administrasi belanja menjadi instrumen pencipta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam era efisiensi anggaran, yang menentukan bukan lagi seberapa besar anggaran yang dimiliki, melainkan ke mana dan untuk apa anggaran tersebut diarahkan. Oleh karena itu, belanja modal dan investasi infrastruktur pendukung ekonomi lokal seperti pasar rakyat, sarana logistik, dan infrastruktur pendukung UMKM perlu diposisikan sebagai penyangga utama pertumbuhan, meskipun ruang fiskal menyempit. Strategi ini bertujuan menjaga peran belanja pemerintah sebagai *growth engine* dan mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam akibat penurunan TKD.

Pemerintah Kabupaten Kudus juga perlu secara aktif mendorong inovasi kebijakan dan inovasi layanan publik sebagai strategi utama dalam merespons keterbatasan fiskal. Literatur inovasi sektor publik menunjukkan bahwa banyak peningkatan kualitas layanan tidak membutuhkan tambahan anggaran, melainkan perubahan cara kerja, simplifikasi prosedur, dan transformasi digital. Laporan OECD (2019) menegaskan bahwa inovasi publik sering bersifat *low-cost but high-impact*, terutama melalui digitalisasi layanan, integrasi proses, dan pengurangan biaya transaksi bagi masyarakat dan

pelaku usaha. Inovasi ini bertujuan menjaga bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun anggaran menurun, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain digitalisasi layanan perizinan dan administrasi dasar, penyederhanaan proses pengadaan skala kecil, serta pemberian ruang eksperimen kebijakan (*policy sandbox*) bagi perangkat daerah untuk mengembangkan solusi lokal berbasis kebutuhan masyarakat.

Selain inovasi internal, pemerintah daerah perlu memperluas pendekatan kolaboratif dengan sektor swasta, BUMD, komunitas lokal, perguruan tinggi, dan dunia usaha melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan. Pendekatan *collaborative governance* menegaskan bahwa kompleksitas persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, terutama dalam kondisi keterbatasan fiskal. Kolaborasi memungkinkan mobilisasi sumber daya non-APBD dan memperluas kapasitas implementasi kebijakan tanpa menambah beban fiskal daerah. Strategi ini bertujuan menjaga kesinambungan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur kecil, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan lokal, dan layanan sosial. Implementasinya dapat dilakukan melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan pemerintah–swasta skala mikro, kolaborasi dengan komunitas dan perguruan tinggi, serta integrasi program desa dan kabupaten untuk menghindari duplikasi anggaran.

Langkah strategis jangka menengah lainnya adalah memperkuat partisipasi masyarakat dan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah sebagai bagian dari penguatan modal sosial. Teori pembangunan manusia menegaskan bahwa pembangunan bukan semata persoalan anggaran, tetapi juga proses memperkuat kapasitas, partisipasi, dan agensi warga. *Development as Freedom* menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Penguatan modal sosial bertujuan meningkatkan efektivitas kebijakan, mengurangi resistensi sosial, serta menciptakan daya lenting (*resilience*) daerah dalam menghadapi tekanan fiskal jangka panjang. Pemerintah daerah dapat memperluas mekanisme perencanaan partisipatif yang bermakna, mendukung inisiatif komunitas lokal, serta membangun narasi pembangunan yang menumbuhkan kebanggaan dan kelekatan psikologis masyarakat terhadap Kabupaten Kudus.

Secara keseluruhan, penurunan TKD perlu diposisikan sebagai momentum transformasi tata kelola fiskal dan pembangunan daerah, bukan sekadar sebagai kendala anggaran. Dalam perspektif kebijakan publik, tekanan fiskal sering menjadi katalis perubahan institusional menuju tata kelola yang lebih efisien dan adaptif. Ketergantungan berlebihan pada transfer pusat justru berisiko melemahkan kemandirian dan inovasi daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perlu diarahkan pada penguatan PAD berbasis efisiensi dan kepatuhan, peningkatan kualitas perencanaan berbasis bukti, serta penguatan kepemimpinan kebijakan yang berorientasi pada kualitas dan dampak, bukan semata pada kuantitas anggaran. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Kudus berpeluang membangun ketahanan fiskal dan ekonomi yang lebih kuat di tengah era efisiensi anggaran.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, terutama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus yang telah menyediakan data dan informasi penting yang mendukung penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta bantuan teknis selama proses penyusunan artikel ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia*. Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kudus menurut lapangan usaha*. BPS Kabupaten Kudus.

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia*. BPS.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan perekonomian Indonesia 2025*. Bank Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota keuangan dan APBN tahun anggaran 2025*. Kemenkeu RI.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- OECD. (2019). *Innovation in public policy: Why, what and how*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a1c5cab4-en>
- OECD. (2023). *Subnational government finance and investment: Key issues and trends*. OECD Publishing.
- Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan. (2025). *Economic outlook 2026: Mentransformasi anggaran menjadi pertumbuhan di era efisiensi anggaran*. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Wibowo, M. G., & Sasana, H. (2021). Efisiensi belanja pemerintah daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 123–137. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i2.13745>
- World Bank. (2022). *Subnational public finance and service delivery in Indonesia*. World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Investing in productivity*. World Bank Group.
- World Bank. (2024). *Decentralization and regional development in emerging economies*. World Bank Group.